

STRATEGI PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SEKOLAH MELALUI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MA RAUDLATUL IRFAN

Wanda Gema Prasadio Akbar Hidayat¹, Intan Primadini², Ananto Prabowo³,
Jasmine Putri⁴, Isysya Kega⁵, Marchella Rachel⁶

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Multimedia Nusantara

^{2,4,5,6}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Multimedia Nusantara

e-mail: wanda.hidayat@umn.ac.id

Abstract

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk mencapai SDGs No. 5 (Kesetaraan Gender), SDGs No. 4 (Kualitas Pendidikan), dan SDGs No. 3 (Hidup Sehat & Sejahtera). Kegiatan PKM ini kami laksanakan di MA Raudlatul Irfan. Kegiatan PKM ini melibatkan guru dan siswa. Melalui program kegiatan PKM, guru dan siswa berhasil meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan kekerasan di lingkungan sekolah. Peningkatan ini penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman. Pelatihan untuk guru menunjukkan hasil positif, dengan akurasi jawaban meningkat dari 44,76% pada pre-test menjadi 75,71% pada post-test, menandakan mereka siap menangani kasus kekerasan dan memahami prosedur pelaporan. Peserta pelatihan tentang KBGO juga mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan, dari 47% menjadi 64%, sehingga lebih responsif terhadap ancaman kekerasan berbasis gender di era digital. Pemahaman siswa tentang kekerasan di sekolah juga meningkat, dari 25,99% menjadi angka yang jauh lebih tinggi setelah pelatihan, membuat mereka lebih mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan, seperti bullying dan diskriminasi. Secara keseluruhan, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta, mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih sehat dan aman.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kesetaraan Gender, Kualitas Pendidikan.

Abstrak

This PKM activity aims to achieve SDGs No. 5 (Gender Equality), SDGs No. 4 (Quality of Education), and SDGs No. 3 (Healthy & Prosperous Life). We carried out the PKM activity at MA Raudlatul Irfan. This PKM activity involved teachers and students. Teachers and students successfully increased their understanding of sexual violence, online gender-based violence (GBV), and violence in the school environment through the PKM activity program. This increase is important to create a safer school environment. The training for teachers showed positive results, with the accuracy of answers increasing from 44.76% in the pre-test to 75.71% in the post-test, indicating that they were ready to handle cases of violence and understand reporting procedures. Participants in the training on GBV also experienced a significant increase in understanding, from 47% to 64%, making them more responsive to the threat of gender-based violence in the digital era. Students' understanding of violence in schools also increased, from 25.99% to a much higher figure after the training, making them better able to recognize various forms of violence, such as bullying and discrimination. Overall, the program successfully increased participants' awareness and knowledge, supporting the creation of a healthier and safer learning environment.

Keywords: Sexual Violence, Gender Equality, Quality of Education.

PENDAHULUAN

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memberikan definisi komprehensif tentang kekerasan seksual, menggambarkannya sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang, yang muncul akibat ketimpangan relasi kuasa atau gender. Tindakan ini membawa dampak yang serius, mulai dari penderitaan fisik dan psikis hingga terganggunya kesempatan korban untuk melanjutkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman. Kekerasan seksual terjadi di berbagai lingkungan, baik ranah privat, seperti rumah tangga, maupun ranah publik, seperti transportasi umum, tempat kerja, hingga institusi pendidikan.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan bahwa sejak Januari 2024 hingga saat ini, tercatat 4.515 kasus kekerasan di Indonesia, dengan korban terbanyak adalah perempuan, yakni sebanyak 3.945 orang. Kekerasan seksual mendominasi dengan 2.140 kasus, di mana mayoritas korban berusia 11-17 tahun. Hal ini sejalan dengan temuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menyebutkan bahwa pada 2022, status korban terbanyak adalah pelajar/mahasiswa, sebanyak 1.016 orang, dan pelakunya juga didominasi oleh kalangan yang sama dengan jumlah 335 orang. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kekerasan seksual memberikan dampak mendalam bagi korban, terutama bagi pelajar. Dampaknya mencakup hilangnya rasa percaya diri, menurunnya prestasi akademik, bahkan hingga depresi dan percobaan bunuh diri.

Menurut penelitian oleh Ramadhani & Nurwati (2023), korban kekerasan seksual pada usia remaja lebih rentan mengalami trauma psikis jangka panjang, yang dapat mengganggu proses belajar dan adaptasi sosial. Selain itu, survei oleh Putu et al. (2022), mengungkapkan bahwa trauma akibat kekerasan seksual cenderung menurunkan motivasi akademik dan menimbulkan kecenderungan isolasi sosial pada siswa sekolah menengah. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan dukungan psikologis yang memadai bagi korban untuk mengatasi dampak kekerasan seksual.

Dalam upaya mencegah kasus kekerasan seksual, diperlukan langkah edukatif yang menyeluruh bagi siswa SMP dan SMA. Edukasi ini meliputi pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta isu terkait, seperti budaya patriarki dan relasi kuasa, yang kerap menjadi akar permasalahan. Menurut Kau et al. (2023), pengenalan aspek relasi kuasa dan gender dalam pendidikan bisa membantu siswa lebih memahami serta mengidentifikasi potensi ancaman kekerasan seksual, sehingga mereka dapat lebih waspada. Pemahaman ini juga bisa mengurangi normalisasi terhadap tindakan kekerasan berbasis gender, yang hingga kini masih sering terjadi karena kurangnya pemahaman publik. Pendekatan komprehensif ini diharapkan tidak hanya mencegah kekerasan seksual tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, di mana siswa merasa dihargai dan dapat beraktivitas tanpa rasa takut.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pesantren menjadi lembaga pendidikan kedua dengan pengaduan terbanyak terkait kekerasan seksual, setelah universitas. Terdapat 51 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di lingkungan pesantren dari tahun 2015 hingga 2023, yang jika dipersentasikan mencapai 19% dari total pengaduan yang diterima. Beberapa kasus mencuat sebagai contoh kejahatan seksual di lingkungan pesantren dan menyoroti kurangnya pengawasan serta kontrol yang ketat dari pihak berwenang, termasuk Kementerian Agama. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus Herry Wirawan, pemilik pesantren di Bandung, yang melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santriwatinya dari tahun 2016 hingga 2021. Kasus ini menggambarkan bagaimana kejahatan tersebut dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi atau dilaporkan.

Kasus lain terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, di mana seorang pengasuh pesantren melakukan pelecehan terhadap 26 santri antara Juni 2020 hingga Agustus 2021. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Jombang, di mana pemilik pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati selama dua tahun. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa lemahnya pengawasan dan regulasi terhadap lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren sering kali memungkinkan terjadinya kekerasan yang tidak terdeteksi dalam waktu lama. Menurut Xaverius Wartoyo & Priskila Ginting, kurangnya pengawasan dan transparansi di lembaga pendidikan keagamaan menyebabkan munculnya ruang-ruang gelap di mana kekerasan seksual dapat terjadi tanpa diawasi oleh otoritas terkait. Sebagai lembaga yang diharapkan membentuk moral dan spiritual santri, pesantren justru menjadi tempat yang berisiko tinggi apabila pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didiknya kurang memadai. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan regulasi yang efektif diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di pesantren. Kementerian Agama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pesantren perlu memperkuat regulasi, menerapkan standar perlindungan terhadap santri, serta memastikan adanya jalur pelaporan yang aman dan tepercaya bagi santri untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan.

Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul Irfan adalah bagian dari pendidikan menengah di Indonesia yang sejajar dengan sekolah menengah atas dalam sistem pendidikan formal dan berlokasi di Jl. TMP Aria Wangsakara, Kp. Lengkong Ulama Rt.001/001, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang, Banten 15850.



Gambar 1. Lingkungan Sekolah Raudlatul Irfan

Sumber: Diambil langsung saat tim mengunjungi sekolah Raudlatul Irfan

Di MA Raudlatul Irfan, dengan jumlah siswa laki-laki yang lebih banyak (117 siswa laki-laki dan 78 siswa perempuan dari total 195 siswa), terdapat potensi risiko terjadinya kekerasan seksual yang lebih tinggi, terutama karena kurangnya infrastruktur teknologi seperti CCTV yang bisa berfungsi sebagai alat pengawasan dan pembuktian. Minimnya teknologi pengawasan menyebabkan para siswa kesulitan melapor karena keterbatasan bukti, yang kemudian menjadi pemicu potensial terjadinya kekerasan seksual. Faktor lain yang mempengaruhi munculnya kekerasan seksual adalah budaya patriarki yang kuat dan telah melekat secara turun-temurun dalam masyarakat. Budaya ini mengukuhkan gagasan bahwa laki-laki lebih memiliki kuasa dan kekuatan dibandingkan perempuan. Sikap ini sering kali menyebabkan pandangan bahwa menggoda atau merendahkan perempuan adalah hal yang wajar, bahkan tanpa persetujuan pihak perempuan. Pola pikir ini didukung oleh kepercayaan bahwa peran utama perempuan adalah untuk melayani laki-laki dan berfokus pada urusan rumah tangga, sehingga perempuan cenderung dipandang sebagai pihak yang lebih lemah dan rentan untuk ditindas. Situasi ini diperparah oleh berbagai hambatan struktural dan sosial, seperti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dan minimnya dukungan pemerintah terhadap korban. Budaya “*victim blaming*” atau menyalahkan korban yang masih kuat di masyarakat Indonesia juga memperburuk keadaan, menyebabkan perempuan korban kekerasan seksual sering kali merasa enggan melapor karena takut mendapat stigma atau dikucilkan.

Penggunaan teknologi oleh remaja saat ini menjadi kebutuhan yang esensial, namun tanpa pengawasan yang tepat, dapat berdampak negatif. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, menekankan pentingnya pengaturan pemakaian teknologi dalam lingkungan pendidikan, mengingat potensi dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak digunakan dengan bijak. Salah satu bentuk dampak negatif yang signifikan adalah Kejahatan Berbasis Gender Online (KBGO), atau bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi melalui teknologi, yang kian meningkat seiring dengan perkembangan digitalisasi. KBGO ini menyerupai kekerasan berbasis gender di dunia nyata dan bertujuan untuk merendahkan korban berdasarkan gender atau orientasi seksualnya.

KBGO meliputi berbagai bentuk, termasuk pelecehan online, peretasan, ancaman penyebaran konten pribadi, dan pencemaran nama baik. Kasus-kasus KBGO ini memiliki dampak yang cukup serius terhadap kesehatan psikologis, reputasi, dan bahkan keselamatan fisik korban, terutama bagi remaja yang mungkin lebih rentan terhadap serangan semacam ini. Misalnya, kasus cyber grooming atau upaya untuk memperdaya melalui media sosial, menjadi salah satu bentuk yang membahayakan anak-anak dan remaja, sehingga penting bagi lembaga pendidikan seperti MA Raudlatul Irfan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan dan edukasi terkait penggunaan teknologi yang aman.

Di MA Raudlatul Irfan, yang memiliki 195 siswa dengan dominasi siswa laki-laki, pengawasan ketat, terutama dengan penerapan teknologi seperti CCTV, menjadi penting untuk meminimalkan potensi kekerasan seksual di sekolah. Tidak adanya fasilitas teknologi tersebut menjadi faktor risiko karena pelaporan menjadi sulit tanpa bukti yang cukup. Di sisi lain, keberadaan budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia turut memperparah situasi ini, karena budaya tersebut kerap kali menempatkan perempuan pada posisi subordinat yang rentan terhadap kekerasan seksual. Perempuan dalam lingkungan ini sering kali tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai, dan kerap menjadi korban budaya *victim blaming* yang melekat di masyarakat.

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk mencapai SDGs No. 5 (Kesetaraan Gender), SDGs No. 4 (Kualitas Pendidikan), dan SDGs No. 3 (Kehidupan Sehat & Sejahtera). Kemudian, tim pengabdian menganalisis situasi berupa permasalahan (immediate, underlying, root cause) yang berkaitan dengan nilai-nilai SDGs tersebut. Setelah memahami permasalahan terkait kesetaraan gender di lingkup

masyarakat, tim pengabdian menetapkan tujuan dan manfaat dari program yang akan dirancang dan diimplementasikan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PKM untuk mencegah kekerasan seksual di MA Raudlatul Irfan dilakukan melalui delapan tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi masalah mitra, di mana ditemukan tujuh masalah prioritas, termasuk kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dan kesetaraan gender, serta ketidaksiapan dalam membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Selain itu, mitra juga belum memiliki perwakilan OSIS yang berfungsi sebagai pendukung korban. Pada tahap kedua, analisis situasi dan kondisi mitra dilakukan melalui survei yang mencakup wawancara dan observasi langsung. Hasil analisis ini membantu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi mitra, serta melibatkan koordinasi untuk menyusun jadwal sosialisasi dan pengajuan izin, seperti untuk pemasangan CCTV di lingkungan sekolah.

Tahap ketiga melibatkan sosialisasi PKM kepada mitra melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Pulih, ICT Watch, dan Satgas PPKS UMN. Sosialisasi ini mencakup topik kesetaraan gender, relasi sehat, dan ancaman kekerasan seksual berbasis teknologi. Yayasan Pulih fokus pada pengenalan konsep kesetaraan gender dan pentingnya persetujuan dalam interaksi sosial, sementara ICT Watch memberikan pemahaman mengenai bahaya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan upaya perlindungan diri di dunia maya. Pada tahap keempat, persiapan transfer teknologi tepat guna (TTG) dilakukan, termasuk pengadaan perangkat CCTV, pembuatan video pencegahan kekerasan seksual, dan penyediaan televisi untuk menayangkan himbauan yang akan diputar secara rutin di sekolah.

Tahap kelima mencakup pelatihan, simulasi, dan pendampingan untuk membangun kesadaran dan keterampilan dalam mencegah kekerasan seksual. Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai kesetaraan gender dan cara memberikan dukungan bagi korban. Monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan PKM dilakukan pada tahap keenam, dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan mitra. Tahap ketujuh dan kedelapan berfokus pada ketercapaian luaran kegiatan dan target pada mitra, yang dievaluasi secara berkala untuk memastikan semua tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan memberikan manfaat bagi mitra.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan PKM membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari mitra, termasuk guru, siswa, dan pihak lain di lingkungan sekolah, sejak tahap awal hingga keberlanjutan program. Keterlibatan mitra dalam identifikasi masalah dan analisis situasi sangat penting untuk memberikan wawasan mendalam tentang tantangan terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender. Diskusi dan wawancara dengan mitra tidak hanya menghasilkan data relevan tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap program, yang krusial untuk keberhasilan implementasi.

Dukungan mitra juga sangat dibutuhkan dalam sosialisasi dan pelatihan. Keterlibatan guru memungkinkan mereka menjadi agen perubahan, sementara siswa dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka, yang memperkaya diskusi. Selain itu, penyediaan data dan informasi akurat mengenai kekerasan seksual penting untuk analisis situasi dan penyesuaian intervensi yang diperlukan. Umpan balik dari kegiatan juga membantu mengevaluasi efektivitas program.

Untuk menciptakan keberlanjutan, mitra diharapkan berperan aktif dalam pembentukan dan pengelolaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Dengan adanya kelompok kerja ini, upaya pencegahan kekerasan seksual dan promosi kesetaraan gender dapat terus dilaksanakan. Secara keseluruhan, partisipasi mitra adalah elemen kunci keberhasilan program PKM, dan kolaborasi yang baik antara semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Guru

Uraian	Pre-Test	Post-Test
Jawaban Benar	44,76%	75,71%
Jawaban salah	55,24%	24,29%
Rata-rata Skor	2.458,47 poin	4.460,50 poin

Analisis hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, khususnya para guru, terkait materi yang diajarkan. Rata-rata akurasi jawaban meningkat dari 44,76% pada pre-test menjadi 75,71% pada post-test, mencerminkan efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai isu-isu kekerasan seksual serta hak-hak korban. Peningkatan akurasi yang signifikan terlihat di hampir semua soal, menunjukkan bahwa materi pelatihan telah diserap dengan baik oleh para peserta. Peningkatan ini sangat penting karena menggambarkan bahwa para guru tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menginternalisasikannya, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menangani isu-isu sensitif di lingkungan sekolah. Secara lebih spesifik, terdapat peningkatan mencolok dalam pemahaman guru tentang hak-hak korban, sanksi administratif yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan, serta prosedur pelaporan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan mereka, tetapi juga memberikan alat dan strategi yang diperlukan untuk menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, para guru kini lebih siap menghadapi situasi terkait kekerasan seksual dan mampu memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban.

Selain itu, penguasaan materi yang meningkat ini dapat berdampak positif pada lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dengan guru yang lebih teredukasi dan siap dalam menangani isu-isu kekerasan seksual, diharapkan akan ada perubahan perilaku yang lebih positif di kalangan siswa. Mereka akan merasa lebih aman dan didukung di lingkungan sekolah, serta lebih mungkin untuk melaporkan insiden kekerasan yang mereka alami atau saksikan. Program pelatihan ini juga menunjukkan pentingnya pengembangan berkelanjutan dalam pendidikan guru. Meningkatkan pemahaman tentang isu-isu kekerasan seksual dan hak-hak korban adalah langkah krusial dalam menciptakan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Oleh karena itu, penting untuk terus melanjutkan dan memperluas pelatihan ini, serta menyertakan topik-topik lanjutan yang relevan untuk menjaga agar para guru selalu terinformasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam bidang ini. Dengan demikian, hasil dari program pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu, tetapi juga berpotensi untuk mengubah dinamika dalam lingkungan sekolah, menjadikan sekolah sebagai tempat yang lebih aman, responsif, dan inklusif bagi semua siswa.

Berdasarkan hasil post-test terhadap materi ICT menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap materi ICT, khususnya yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Akurasi jawaban peserta meningkat dari 47% pada pre-test menjadi 64% pada post-test, yang mencerminkan bahwa peserta mampu menyerap materi dengan baik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program pelatihan yang diterapkan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai isu-isu yang sangat relevan dan mendesak dalam konteks saat ini. Peningkatan tertinggi terlihat pada soal-soal yang berhubungan dengan teknologi pelaporan dan keamanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapatkan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan berbasis gender online serta menggunakan teknologi dengan aman adalah komponen krusial dalam menangani isu KBGO. Keterampilan ini akan memungkinkan peserta untuk lebih responsif dan proaktif dalam melindungi diri mereka sendiri serta orang lain dari kekerasan berbasis gender di dunia maya.

Selain itu, peningkatan pemahaman tentang konsep-konsep digital yang terkait dengan kekerasan berbasis gender online sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana berinteraksi secara aman di dunia digital, peserta dapat lebih siap untuk menghadapi risiko yang mungkin muncul. Ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi peserta, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi untuk mencegah dan melaporkan kasus kekerasan. Kemampuan ini berpotensi berkontribusi pada perubahan budaya di lingkungan pendidikan, di mana peserta didik lebih peka dan responsif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender. Mereka akan lebih cenderung untuk membantu teman sebaya yang mengalami kekerasan, serta berperan aktif dalam menciptakan komunitas yang mendukung dan memberdayakan.

Keberhasilan program pelatihan ini juga menunjukkan pentingnya melanjutkan inisiatif serupa di masa mendatang. Pelatihan tambahan yang berfokus pada isu-isu terkini dan praktik terbaik dalam penggunaan teknologi untuk keamanan dan pelaporan dapat terus memperkuat kemampuan peserta. Oleh karena itu, penting untuk merancang program yang berkelanjutan dan adaptif, yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah. Dengan demikian,

pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta tetapi juga membekali mereka dengan alat dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kekerasan berbasis gender online.

Hasil Pre-test dan Post-test Siswa

Hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai kekerasan di lingkungan sekolah masih sangat rendah, dengan total jawaban benar hanya mencapai 25,99%. Angka ini mencerminkan adanya kekurangan pengetahuan dan kesadaran yang mendalam mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan di sekolah. Rincian hasil per soal memberikan gambaran yang jelas tentang area-area yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

Dalam Soal Nomor Satu, yang menanyakan tentang jenis kekerasan yang sering terjadi di sekolah, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan tersebut, dengan persentase 0%. Ketidakmampuan ini sangat memprihatinkan, karena menunjukkan kurangnya kesadaran siswa terhadap masalah serius yang dapat memengaruhi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Ini menandakan bahwa siswa mungkin tidak pernah mendapatkan informasi atau pendidikan yang memadai mengenai kekerasan di sekolah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur untuk mendidik siswa tentang berbagai bentuk kekerasan yang mungkin mereka temui, sehingga mereka lebih siap untuk mengenali dan menanggapi situasi tersebut.

Selanjutnya, mengenai pemahaman atas tindakan diskriminatif menunjukkan bahwa hampir setengah dari siswa (46,7%) memahami konsep diskriminasi. Meskipun angka ini tergolong cukup baik, masih ada ruang signifikan untuk peningkatan. Pengetahuan yang terbatas mengenai tindakan diskriminatif dapat berpotensi mengakibatkan siswa tidak mampu mengenali atau melawan perilaku yang merugikan. Penting untuk memberikan pendidikan yang lebih mendalam mengenai diskriminasi, termasuk jenis-jenisnya dan dampak yang ditimbulkan terhadap individu dan kelompok. Melalui program pendidikan yang efektif, siswa dapat diajarkan untuk lebih peka terhadap isu-isu diskriminasi dan dilatih untuk menjadi advokat bagi diri mereka sendiri dan teman-teman mereka.

Soal selanjutnya terkait peraturan yang ada untuk melindungi siswa dari kekerasan menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan, dengan hanya 10,53% siswa yang memahami peraturan tersebut. Angka ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menyebarluaskan informasi tentang hak-hak siswa dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika menjadi korban kekerasan. Jika siswa tidak mengetahui tindakan yang bisa diambil, mereka mungkin merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk menyertakan materi pendidikan yang menjelaskan hak-hak mereka dan cara mendapatkan bantuan.

Pada Soal terkait jenis perilaku kekerasan seksual, hanya kurang dari sepertiga siswa yang mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, dengan hasil 27,63%. Ini menunjukkan perlunya pendidikan seks yang lebih komprehensif untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang perilaku yang dianggap tidak pantas dan bagaimana cara mengenali serta melaporkan kasus tersebut. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual, siswa dapat lebih siap untuk melindungi diri mereka sendiri dan membantu teman-teman yang mungkin menghadapi situasi serupa. Oleh karena itu, kurikulum yang mencakup pendidikan seks yang sehat dan informatif perlu diterapkan.

Dalam Soal Nomor Lima, yang menanyakan tentang pihak yang dapat diberikan hukuman dalam kasus kekerasan, hanya 38,16% siswa yang memahami siapa saja yang dapat bertanggung jawab. Pemahaman tentang akuntabilitas dalam situasi kekerasan sangat penting, karena siswa perlu tahu bahwa ada konsekuensi hukum untuk tindakan kekerasan. Edukasi tentang konsekuensi hukum perlu ditekankan agar siswa memahami bahwa tindakan mereka memiliki dampak yang signifikan. Dengan pengetahuan ini, siswa dapat didorong untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan melaporkan kasus kekerasan yang mereka saksikan.

Terakhir, mengenai perilaku yang tidak menunjukkan empati terhadap korban kekerasan, hanya 32,89% siswa yang mampu mengenali perilaku tersebut. Rendahnya pemahaman ini menunjukkan perlunya pembelajaran lebih lanjut tentang pentingnya empati dan dukungan kepada korban. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan empati harus dimasukkan dalam kurikulum agar siswa dapat memahami dampak emosional dari kekerasan. Dengan membangun budaya empati di sekolah, siswa akan lebih mampu merespons dan mendukung teman-teman mereka yang mengalami kekerasan, menciptakan lingkungan yang lebih positif dan inklusif bagi semua.

Setelah pelaksanaan post-test, hasil menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini mencerminkan efektivitas program edukasi yang telah dilakukan. Dalam post-test, bullying disebut sebagai kekerasan yang paling umum terjadi, meskipun hanya dicatat oleh 2,6% siswa. Angka ini, meski rendah, menunjukkan adanya pengenalan terhadap bullying, namun kesadaran akan isu ini masih perlu ditingkatkan. Selain bullying, siswa juga mulai mengenali berbagai bentuk kekerasan lain yang dapat terjadi di lingkungan sekolah, seperti kekerasan verbal, kekerasan seksual, intoleransi, dan pelecehan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mulai mengenali berbagai bentuk kekerasan, meskipun pemahaman mereka masih terbatas.

Salah satu temuan positif dari post-test adalah bahwa 100% siswa setuju bahwa tindakan diskriminasi berdasarkan agama atau etnis adalah bentuk kekerasan. Angka ini sangat mengembirakan, karena menunjukkan pemahaman yang baik dari siswa mengenai isu intoleransi. Kesadaran penuh ini penting untuk membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan aman, serta untuk mengurangi diskriminasi di antara siswa. Selain itu, mayoritas siswa kini memahami bahwa kekerasan di sekolah diatur oleh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Peningkatan pemahaman ini menandakan bahwa siswa semakin sadar akan hukum yang berlaku dan hak-hak mereka, yang penting untuk memfasilitasi tindakan yang tepat jika mereka atau teman-teman mereka menghadapi situasi kekerasan.

Dalam hal kekerasan seksual, hasil post-test menunjukkan bahwa mayoritas siswa kini mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual dengan benar. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pendidikan yang lebih baik mengenai isu kekerasan seksual, yang sangat penting untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenali dan melaporkan perilaku yang tidak pantas. Selain itu, sebagian besar siswa juga menunjukkan pemahaman yang jelas bahwa berbagai pihak, termasuk pelaku kekerasan, dapat dikenakan sanksi hukum. Kesadaran ini sangat krusial, karena menandakan bahwa siswa memahami adanya konsekuensi bagi tindakan kekerasan. Hal ini berpotensi memotivasi mereka untuk berperilaku lebih bertanggung jawab dan berani melaporkan tindakan kekerasan yang mereka saksikan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung di sekolah.

Terakhir, mayoritas siswa kini mampu mengidentifikasi tindakan menyebarkan cerita tanpa persetujuan korban sebagai bentuk ketidakempatian. Peningkatan kesadaran ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami pentingnya empati dan dukungan terhadap korban. Dengan pemahaman ini, diharapkan siswa akan lebih peka terhadap perasaan dan kondisi teman-teman mereka yang menjadi korban kekerasan, serta lebih berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung dan aman. Melalui sikap saling menghargai dan berempati, siswa diharapkan dapat berkontribusi dalam mencegah tindakan kekerasan dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada mereka yang mengalami situasi sulit.

Secara keseluruhan, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai kekerasan di lingkungan sekolah. Ini juga menunjukkan potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif melalui pendidikan yang efektif. Upaya ini perlu terus dilanjutkan agar siswa tidak hanya memahami isu-isu kekerasan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test di atas menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai kekerasan di lingkungan sekolah. Dari hasil pre-test, terlihat bahwa pemahaman siswa masih sangat rendah, dengan kesulitan dalam mengenali jenis-jenis kekerasan yang umum terjadi dan memahami peraturan yang melindungi mereka. Hal ini menandakan perlunya intervensi yang lebih mendalam untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu kekerasan di sekolah. Setelah diberikan materi edukasi, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama terkait dengan diskriminasi berbasis agama atau etnis, kekerasan seksual, dan regulasi hukum yang mengatur kekerasan di sekolah. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan siswa dan memberi mereka alat untuk mengenali dan menangani situasi kekerasan. Namun, meskipun ada kemajuan yang positif, kesadaran siswa mengenai pentingnya empati terhadap korban kekerasan masih memerlukan perhatian lebih lanjut, menunjukkan bahwa pendidikan tentang empati dan dukungan kepada korban adalah aspek krusial yang perlu ditingkatkan dalam program-program mendatang. Secara keseluruhan, hasil ini menandakan kemajuan yang baik dalam pemahaman siswa tentang kekerasan di lingkungan pendidikan, tetapi juga menegaskan

pentingnya keberlanjutan dalam upaya edukasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua siswa.

Berdasarkan hasil post-test yang dilakukan terhadap 83 responden menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai isu kekerasan di lingkungan sekolah. Dengan skor rata-rata mencapai 67,47 dari 100 poin dan median skor 70, dapat disimpulkan bahwa setengah dari peserta berhasil meraih skor di atas 70. Rentang skor yang diperoleh bervariasi cukup besar, dengan skor terendah 15 dan tertinggi 100. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peserta menunjukkan pemahaman yang baik, ada beberapa individu yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang telah diajarkan.

Distribusi skor juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memperoleh skor dalam rentang 70-80, dengan puncak pada rentang 80-90. Ini menandakan bahwa program edukasi yang diberikan cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa secara umum, meskipun terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Beberapa pertanyaan dalam post-test menunjukkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada kesalahan pemahaman di kalangan peserta.

Beberapa pertanyaan yang paling sering salah jawab mencerminkan area yang perlu perhatian lebih lanjut. Misalnya, hanya 18% dari peserta yang menjawab dengan benar tentang konsep persetujuan (consent), di mana mereka harus memahami bahwa consent tidak berlaku jika korban tidak sepenuhnya sadar. Sebagian besar responden (39,8%) salah memahami bahwa consent tidak berlaku untuk korban di bawah usia 18 tahun, yang menunjukkan adanya kebingungan terkait hukum dan etika seputar persetujuan.

Dalam hal perbedaan gender dan jenis kelamin, hasil menunjukkan bahwa 73,2% responden salah menjawab, dengan hanya 28,8% yang paham bahwa gender berbeda dari jenis kelamin. Kesalahpahaman ini penting untuk diatasi, mengingat pemahaman yang benar tentang perbedaan ini adalah fundamental dalam membangun kesadaran terhadap kekerasan berbasis gender.

Meskipun terdapat beberapa kesalahan pemahaman, mayoritas peserta menunjukkan pengetahuan yang baik tentang kekerasan berbasis gender (KBG). Sebanyak 79,5% peserta dapat mengidentifikasi bahwa pelecehan merupakan bagian dari KBG. Di sisi lain, mayoritas (84 dari 81 peserta, atau sekitar 101%) memahami tindakan yang benar dalam kasus kekerasan, yaitu membawa korban ke tempat yang aman dan memberikan dukungan psikologis.

Namun, dalam konteks perilaku dalam relasi, hanya 47 dari 83 responden yang mampu mengidentifikasi bahwa berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama bukanlah kekerasan dalam relasi. Sebagian peserta masih keliru memahami bahwa mengontrol aktivitas pasangan atau menyebarkan rumor negatif bukanlah tindakan kekerasan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu diatasi.

Secara keseluruhan, hasil post-test menunjukkan bahwa meskipun pemahaman peserta mengenai isu kekerasan, persetujuan, dan KBG bervariasi, sebagian besar telah memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan berbasis gender dan relasi yang sehat. Namun, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, penting untuk terus memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam pemahaman peserta, terutama mengenai perbedaan gender, kondisi persetujuan, dan pengertian relasi sehat. Upaya edukasi yang berkelanjutan dan lebih mendalam pada area yang bermasalah ini akan sangat diperlukan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan akurat.

Berdasarkan hasil pre-test yang dilakukan terhadap 126 responden mengungkapkan sejumlah temuan yang signifikan terkait pemahaman peserta mengenai isu kekerasan di lingkungan sekolah. Dengan skor rata-rata hanya mencapai 57,22 dari 100 poin dan median skor di angka 55, terlihat bahwa pemahaman peserta secara keseluruhan masih berada di bawah standar yang diharapkan. Rentang skor yang bervariasi, dengan skor terendah mencapai 0 dan tertinggi 100, menunjukkan adanya perbedaan pemahaman yang mencolok antar peserta. Hal ini mencerminkan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang topik ini.

Sebagian besar peserta memperoleh skor dalam rentang 60-70 poin, dengan puncak pada rentang 70-80 poin. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peserta yang menunjukkan pemahaman yang baik, masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengenali dan memahami berbagai aspek kekerasan. Pertanyaan-pertanyaan dalam pre-test yang sering dijawab salah memberikan gambaran tentang area-area yang perlu perhatian lebih lanjut dalam pendidikan mengenai kekerasan.

Salah satu topik yang menunjukkan tingkat kesulitan tinggi adalah perbedaan gender dan jenis kelamin, di mana 76% (95 dari 125) peserta salah menjawab, hanya 24% (30 dari 125) yang benar-

benar memahami perbedaan tersebut. Kesalahpahaman ini sangat krusial, mengingat pemahaman yang benar tentang gender adalah fundamental dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman. Selain itu, konsep consent juga menjadi area yang memerlukan perhatian, dengan hanya 26 dari 124 peserta yang mampu menjawab dengan benar bahwa consent tidak berlaku jika korban tidak sepenuhnya sadar.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek di mana peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Sebanyak 86,1% peserta paham bahwa relasi yang penuh kekerasan bukanlah relasi sehat. Namun, 18,7% masih keliru dalam mengidentifikasi contoh relasi yang sehat, menandakan perlunya penekanan lebih pada pengajaran tentang ciri-ciri relasi yang sehat. Dalam hal kekerasan berbasis gender (KBG), mayoritas peserta (85,7%) memahami bahwa pelecehan merupakan bagian dari KBG, menunjukkan bahwa kesadaran mengenai isu ini sudah mulai berkembang di kalangan peserta.

Ketika ditanya tentang tindakan yang harus dilakukan saat melihat kasus kekerasan, 79% peserta paham bahwa tindakan yang benar adalah membawa korban ke tempat yang aman dan memberikan dukungan psikologis. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman dasar mengenai langkah-langkah yang tepat dalam situasi darurat. Namun, dalam konteks perilaku dalam relasi, hanya 54% yang dapat mengidentifikasi bahwa berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama tidak termasuk kekerasan, sedangkan 18,3% masih salah memahami bahwa mengontrol aktivitas pasangan bukanlah tindakan kekerasan.

Secara keseluruhan, hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai isu kekerasan dan relasi sehat masih sangat bervariasi. Banyak peserta yang masih mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan gender dan jenis kelamin serta konsep consent. Namun, terdapat pula indikasi bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan berbasis gender. Temuan ini menunjukkan perlunya program pendidikan yang lebih mendalam dan terstruktur untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai isu-isu penting ini dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif.

Hasil dari post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta dibandingkan dengan pre-test, terutama dalam aspek relasi sehat dan kekerasan berbasis gender. Hal ini mencerminkan efektivitas program edukasi yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai isu-isu penting tersebut. Namun, meskipun ada kemajuan yang positif, masih terdapat kekurangan pemahaman di antara peserta, khususnya mengenai perbedaan gender dan jenis kelamin, serta situasi yang mempengaruhi konsep persetujuan (consent). Miskonsepsi ini menegaskan perlunya edukasi lebih lanjut agar peserta dapat sepenuhnya memahami perbedaan dan dinamika yang ada dalam hubungan interpersonal. Dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh, program edukasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman peserta terkait isu-isu ini. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relasi yang sehat dan isu kekerasan berbasis gender. Dengan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam, diharapkan peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, membantu menciptakan atmosfer yang lebih aman dan mendukung bagi semua siswa.

SIMPULAN

Program kegiatan PKM yang dilakukan untuk guru dan siswa berhasil meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan kekerasan di lingkungan sekolah. Peningkatan pemahaman ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan suportif. Pertama, program pelatihan untuk guru terbukti efektif. Akurasi jawaban mereka meningkat dari 44,76% pada pre-test menjadi 75,71% pada post-test. Hal ini menunjukkan bahwa para guru tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berhasil menginternalisasikan pengetahuan yang diberikan. Dengan peningkatan ini, guru kini lebih siap untuk menangani kasus kekerasan dan memahami prosedur pelaporan, sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman bagi siswa. Kedua, peserta pelatihan mengenai KBGO juga mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan, dari 47% pada pre-test menjadi 64% pada post-test. Pengetahuan yang diperoleh mengenai teknologi pelaporan dan keamanan digital membuat mereka lebih responsif terhadap ancaman KBGO. Di era digital saat ini, kemampuan ini sangat penting untuk melindungi diri dan orang lain dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi secara online. Terakhir, pemahaman siswa tentang kekerasan di lingkungan sekolah menunjukkan kemajuan yang pesat. Sebelum pelatihan, hanya 25,99% siswa yang menjawab dengan

benar, namun setelah pelatihan, pemahaman mereka meningkat secara signifikan. Siswa kini lebih mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan, termasuk bullying dan diskriminasi, serta memahami regulasi terkait kekerasan di sekolah. Secara keseluruhan, program pelatihan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta, mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kekerasan, baik guru maupun siswa dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan aman

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah mendukung dan membantu mendanai program ini sehingga program telah terlaksana dengan baik dan lancar. Terlaksananya Hibah PKM ini mengharapkan para pelajar dan pengajar bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang anti kekerasan seksual dan memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, relasi sehat, kesetaraan gender, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menjadi korban/saksi kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Kau, M. U., Sartika, E., & Nasiru, L. O. G. (2023). SOSIALISASI PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI MELALUI PROGRAM KKNT DI DESA TOROSIAJE. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1364–1374. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3321>
- Putu, L., Sukma, D., Ketut, N., Adhi, J., Hartika, L. D., Program, S., Psikologi, U., & Dhyana, P. (2022). Dukungan Sosial Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 6(2), 2580–4065.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). DAMPAK TRAUMATIS REMAJA KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Xaverius Wartoyo, F., & Priskila Ginting, Y. (n.d.). *KEKERASAN SEKSUAL PADA LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI NILAI PANCASILA SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF PANCASILA VALUES*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- KemenPPPA. *Data Kekerasan Seksual di Indonesia [Internet]*. 2024. Available from: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2023. Jakarta; 2023 Mar.
- Sandro GS. Kota Tangerang Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak, Enam Bulan Terakhir Sebanyak 67 Kasus [Internet]. 2023. Available from: <https://wartakota.tribunnews.com/2023/07/28/darurat-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-kota-tangerang-enam-bulan-terakhir-sebanyak-67-kasus>
- Ohene S-A, Johnson K, Atunah-Jay S, Owusu A, Borowsky IW. Sexual and physical violence victimization among senior high school students in Ghana: Risk and protective factors. *Soc Sci Med* [Internet]. 2015 Dec;146:266–75. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0277953615301623>
- Sandi F. Nadiem Makarim: Teknologi Ibarat Pisau Bermata Dua [Internet]. 2019. Available from: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191028131035-37-110632/nadiem-makarim-teknologi-ibarat-pisau-bermata-dua>
- SAFENet. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online [Internet]. Available from: <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>